



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
BALAI BESAR GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT**

Jalan Diponegoro No. 12, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung 40115
Telepon. (022) 4231191 Faksimile (022) 4207922

Laman: <https://bbgtkjabar.kemdikdasmen.go.id> surel:bbgtkjabar@kemdikdasmen.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Nomor: 0525/B7.2/OT.01.00/2025
T E N T A N G
RENCANA STRATEGIS
BALAI BESAR GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2025-2029**

- Menimbang.
- Kepala Balai Besar Guru Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Barat,
- a. bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu disusun Rencana Strategis Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Strategis Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 – 2029;
- Mengingat.
- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - d. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 - f. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - g. Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
 - h. Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja kementerian dan Lembaga;
 - i. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia nomor 10 tahun 2023 tentang tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2025-2029;

- j. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan, Dasar dan Menengah Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru Dan Tenaga Kependidikan;
- l. Peraturan Menteri Pendidikan, Dasar dan Menengah Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025- 2029;
- PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut Renstra Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat, merupakan dokumen perencanaan Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Barat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Barat ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:
- a. Bab I : Pendahuluan,
 - b. Bab II : Tujuan dan Sasaran Strategis,
 - c. Bab III : Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan,
 - d. Bab IV : Target Kinerja dan Kerangka Pendaan
 - e. Bab V : Penutup
 - f. Lampiran
- yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru Tahun 2025 – 2029;
- KETIGA : Data dan informasi kinerja Renstra Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Barat yang termuat dalam Sistem Informasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran Renstra yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru Tahun 2025 – 2029;
- KEEMPAT : Rencana Strategi Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh unit kerja di Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

- KELIMA : Seluruh unit kerja di Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Barat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan Renstra Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Barat yang telah dituangkan dalam rencana kerja Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Barat;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya dan menetapkan sebagaimana peraturan berlaku.



Ditetapkan di : B a n d u n g
Pada tanggal : 5 Desember 2025

Kepala,

SUGITO ADIWARSI
NIP 197208112002121001

RENCANA STRATEGIS

2025 - 2029

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru
Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan
Provinsi Jawa Barat

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Draft Rencana Strategis (Renstra) BBGTK Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2029. Renstra BBGTK Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Permendikdasmen Nomer 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata UPT Bidang GTK dan Peraturan Menteri Pendidikan dasar dan Menengah Nomer 19 Tahun 2025 tentang Renstra Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029. Mengemban amanat dimaksud, sebagai lembaga baru tentu segera menyiapkan perencanaan yang matang untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga dimaksud.

Rencana Strategis (Renstra) BBGTK Provinsi Jawa Barat tahun 2025 – 2029 merupakan perwujudan pemikiran dan komitmen Lembaga untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan BBGTK Provinsi Jawa Barat berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance. Sejalan dengan hal tersebut, Renstra dimaksud disusun untuk memenuhi dan menjawab tuntutan peningkatan kinerja aparatur maupun lembaga yang harus diemban oleh BBGP Provinsi Jawa Barat dalam memberikan dukungan manajemen guna mencapai tujuan dan sasaran Lembaga sebagaimana diamanatkan oleh Renstra pada periode sebelumnya. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan, kekuatan untuk merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dan bisa memberikan kontribusi peningkatan mutu pendidikan di tanah air.



Bandung, 05 Desember 2025
Kepala,


Dr. Sugito Adiwarsito, M.Pd.Or.
NIP 197208112002121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum.....	2
1.2. Gambaran Pencapaian Kinerja Tahun sebelumnya.....	3
1.3 Isu-isu Strategis Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan.....	6
1.4 Potensi dan Permasalahan.....	8
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BBGTK PROVINSI JAWA BARAT.....	13
2.1 Visi BBGTK Provinsi Jawa Barat.....	13
2.2 Misi BBGTK Provinsi Jawa Barat.....	14
2.3 Tujuan BBGTK Provinsi Jawa Barat.....	14
2.4 Sasaran Strategis BBGTK Provinsi Jawa Barat.....	15
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	18
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	18
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kemendikdasmen dan Ditjen GTKPG.....	19
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi BBGTK Provinsi Jawa Barat.....	22
3.3 Kerangka Regulasi.....	22
3.4 Kerangka Kelembagaan.....	23
3.5 Reformasi Birokrasi.....	27
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	28
4.1 Target Kinerja.....	28
4.2 Kerangka Pendanaan.....	29
BAB V PENUTUP.....	30
LAMPIRAN.....	31
Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan BBGTK Provinsi Jawa Barat.....	31
Lampiran 2: Matriks Kerangka Regulasi.....	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Satuan Pendidikan, Guru, Kepala Sekolah, dan Tenaga Kependidikan di Wilayah Provinsi Jawa Barat.....	2
Tabel 1.2 Renstra dan Reviu Renstra BBGP Jawa Barat.....	4
Tabel 1.3 Target dan Capaian Renstra BBGP Jawa Barat Tahun 2022-2024.....	5
Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan BBGTK Provinsi Jawa Barat.....	14
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis BBGTK Provinsi Jawa Barat.....	15
Tabel 2.3 Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Indikasi Risiko.....	15
Tabel 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kemendikdasmen dan Ditjen GTKPG.....	20
Tabel 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BBGTK Jawa Barat.....	22
Tabel 3.3 Kerangka Regulasi.....	23
Tabel 3.4 Data Pegawai BBGTK Provinsi Jawa Barat.....	25
Tabel 4.1 Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja BBGTK Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029.....	28
Tabel 4.2 Indikasi Kebutuhan Pendanaan BBGTK Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 - 2029 (dalam juta rupiah).....	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi.....	13
Gambar 2.2 Peta Strategi BBGTK Jawa Barat Tahun 2025—2029.....	16
Gambar 3.1 Struktur Organisasi BBGTK Provinsi Jawa Barat.....	25

BAB I PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan landasan penting yang menjadi tumpuan dari tercapainya cita-cita bangsa. Hal tersebut tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pembangunan pendidikan pada dasarnya diarahkan pada pencapaian empat tujuan kemerdekaan negara Indonesia. Tujuan pertama, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memiliki implikasi pentingnya menumbuhkan kesadaran peserta didik tentang kemajemukan bangsa Indonesia dari berbagai segi bersama sejarah keberadaannya, dan kesadaran tentang keberadaan seluruh tumpah darah bersama kekayaan dan tantangannya. Tujuan kedua, untuk memajukan kesejahteraan umum, memiliki implikasi pentingnya menanamkan sikap peduli pada pemenuhan kebutuhan atas kesejahteraan lahir dan batin bagi rakyatnya. Tujuan ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa, memiliki implikasi tentang pentingnya membangun kehidupan yang cerdas, yaitu kehidupan yang berorientasi pada kebajikan, keunggulan, dan kemajuan berkelanjutan dan terhindar dari segala hal yang merugikan dan/atau merusak, baik bagi dirinya sendiri maupun masyarakat. Tujuan keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, memiliki implikasi atas pentingnya mengembangkan wawasan dan kompetensi kemanusiaan, serta wawasan internasional. Pencapaian keempat tujuan tersebut sangat ditentukan oleh keberhasilan tujuan ketiga yang menjadi tanggung jawab pendidikan nasional.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang ditetapkan dengan Undang-Undang 59 Tahun 2024, bahwa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, salah satu misi (agenda) pembangunan yang akan dilaksanakan adalah Transformasi Sosial, yaitu untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing. Upaya tersebut dilakukan dengan memastikan pendidikan berkualitas yang merata, sehingga pendidikan menjadi inklusif dan adaptif dengan kualitas dan relevansi pendidikan yang terus meningkat sesuai tuntutan global dan zaman, berbasis prinsip pendidikan sepanjang hayat. Upaya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional adalah melalui penyediaan layanan pendidikan bermutu untuk semua.

Pendidikan bermutu untuk semua diperlukan untuk dapat memberikan kesempatan pendidikan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang aspek kewilayahan, gender, kelompok ekonomi-sosial-budaya, serta memberikan pengalaman pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga secara holistik dan terpadu. Pendidikan bermutu diharapkan menghasilkan lulusan pendidikan yang berkualitas, yang berkeimanan dan berketakwaan terhadap Tuhan YME, berkewarganegaraan, bernalar kritis, kreatif, kolaboratif, mandiri, sehat, dan komunikatif. Untuk itu, diperlukan adanya perencanaan berkualitas yang memuat arah kebijakan, strategi dan program prioritas, yang akan memastikan pelaksanaan pembangunan pendidikan dilaksanakan secara berkesinambungan, partisipatif, dan tepat sasaran.

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah disusun sesuai dengan pedoman teknis penyusunan rencana strategis Kementerian/Lembaga yang diatur oleh Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memuat rumusan kebijakan dan strategi, tujuan, sasaran strategis, serta program dan kegiatan sebagai payung bagi setiap unit di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar dapat melaksanakan langkah-langkah perlu dilakukan, mensinergikan fungsi dan peran, serta melaksanakan kolaborasi

dan kerja sama antar pihak dalam mendorong terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi strategi pembangunan pendidikan bagi provinsi dan kabupaten/kota, pemangku kepentingan pendidikan, dan mitra pembangunan pendidikan. Dengan rencana yang disusun, dan memastikan untuk dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh, terpadu, sinergis dan kolaboratif tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dapat secara optimal mendukung tercapainya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

1.1 Kondisi Umum

BBGTK Provinsi Jawa Barat berdiri pada tanggal diundangkan yaitu 24 April 2025, memiliki peran penting dalam mengembangkan model peningkatan kompetensi dan media pembelajaran, meningkatkan kompetensi serta memberdayakan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah di Provinsi Jawa Barat untuk pendidikan formal dan pendidikan non-formal.

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru Dan Tenaga Kependidikan pada tanggal 24 April 2025, Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) provinsi Jawa Barat berubah nama menjadi Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) provinsi Jawa Barat yang memiliki tugas Pengembangan dan Pemberdayaan Guru, Kepala Sekolah, Pendidik Lainnya, dan Tenaga Kependidikan di Wilayah Provinsi Jawa Barat.

Tabel 1.1 Data Satuan Pendidikan, Guru, Kepala Sekolah, dan Tenaga Kependidikan di Wilayah Provinsi Jawa Barat

JENJANG	Jumlah Satpen	KEPSEK						GURU					TENDIK					GRAND TOTAL GTK
		ASN		NON ASN		TOTAL KEPSEK	ASN		NON ASN		TOTAL GURU	ASN		NON ASN		TOTAL TENDIK		
		<S1	>=S1	<S1	>=S1		<S1	>=S1	<S1	>=S1		<S1	>=S1	<S1	>=S1			
TK	NEGERI	189	0	160	0	8	168	10	565	46	322	943	21	5	123	24	173	1.284
	SWASTA	9.863	7	1.062	1.174	7.386	9.629	20	863	12.377	18.509	31.769	0	9	3.252	742	4.003	45.401
SPK TK	NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SWASTA	11	0	0	1	5	6	0	0	6	47	53	0	0	5	9	14	73
KB	NEGERI	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	1	1	2	5
	SWASTA	13.671	4	31	6.439	6.080	12.554	3	40	29.240	7.163	36.446	3	12	3.933	892	4.840	53.840
SPK KB	NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SWASTA	5	0	0	0	1	1	0	0	3	12	15	0	0	1	4	5	21
TPA	NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SWASTA	151	0	0	59	72	131	0	0	406	104	510	0	0	63	10	73	714
SPS	NEGERI	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SWASTA	6.459	1	8	3.588	2.507	6.104	1	15	15.303	2.971	18.290	1	10	2.115	382	2.508	26.902

D I K D A S	SD	NEGERI	16.942	11	14.338	2	0	14.351	835	120.249	5.084	39.280	165.448	3.588	1.459	15.856	3.299	24.202	204.001	
		SWASTA	2.679	1	26	170	2.453	2.650	2	100	6.287	33.651	40.040	1	0	4.320	1.398	5.719	48.409	
	SPK SD	NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SWASTA	24	0	0	0	19	19	0	1	37	411	449	0	0	36	27	63	531	
	SMP	NEGERI	2.000	3	1.768	0	0	1.771	290	43.071	493	8.987	52.841	2.561	1.410	7.734	1.868	13.573	68.185	
		SWASTA	4.198	1	66	192	3.788	4.047	15	234	6.662	36.868	43.779	7	6	6.861	1.961	8.835	56.661	
	SPK SMP	NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SWASTA	22	0	0	0	13	13	0	0	45	206	251	0	0	19	26	45	309	
	D I K M E N S U S	SMA	NEGERI	522	0	614	0	0	614	24	21.234	56	4.739	26.053	560	506	4.572	1.769	7.407	34.074
			SWASTA	1.343	0	36	43	1.225	1.304	5	242	1.932	16.924	19.103	0	2	2.832	952	3.786	24.193
SPK SMA		NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SWASTA	20	0	0	1	15	16	0	0	33	241	274	0	0	23	31	54	344	
SMK		NEGERI	287	0	341	0	0	341	27	14.000	54	4.327	18.408	197	247	3.338	1.293	5.075	23.824	
		SWASTA	2.620	0	81	62	2.405	2.548	6	343	4.685	36.008	41.042	1	3	7.961	1.710	9.675	53.265	
SLB		NEGERI	60	0	62	0	0	62	5	1.461	5	480	1.951	65	29	300	140	534	2.547	
		SWASTA	339	0	155	3	185	343	4	358	316	2.147	2.825	0	0	515	69	584	3.752	

D I K M A S	PKBM	NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SWASTA	2.360	1	9	704	1.312	2.026	57	140	6.742	6.393	13.332	7	7	1.502	240	1.756	17.114
	SKB	NEGERI	26	1	22	0	0	23	6	112	69	211	398	23	16	57	18	114	535
		SWASTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KURS US	NEGERI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SWASTA	2.035	0	0	41	0	41	1	0	370	1	372	0	0	83	0	83	496
	TOTAL NEGERI		20.032	15	17.305	2	8	17.330	1.197	200.692	5.810	58.346	266.045	7.015	3.672	31.981	8.412	51.080	334.455
	TOTAL SWASTA		45.800	15	1.474	12.477	27.466	41.432	114	2.336	84.444	161.656	248.550	20	49	33.521	8.453	42.043	332.025
	GRAND TOTAL		65.832	30	18.779	12.479	27.474	58.762	1.311	203.028	90.254	220.002	514.595	7.035	3.721	65.502	16.865	93.123	666.480

Berdasarkan data pada tabel diatas, menunjukkan bahwa target capaian BBGK Provinsi Jawa Barat adalah sejumlah 666.480 Guru, Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan dari 65.832 satuan pendidikan negeri swasta yang harus dilayani.

Maka Renstra ini merupakan acuan pelaksanaan program lembaga dalam mendukung realisasi dan pencapaian kinerja BBGK Provinsi Jawa Barat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu untuk menyusun arah kebijakan dan strategi pencapaian kinerja BBGK Provinsi Jawa Barat tahun 2025–2029.

1.2. Gambaran Pencapaian Kinerja Tahun sebelumnya

Dalam kurun waktu 2022-2024 berbagai kegiatan telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan target dari program guru dan tenaga kependidikan dengan capaian kinerja program guru dan tenaga kependidikan yang diukur menggunakan indikator kinerja sesuai target sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) BBGP Jawa Barat.

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BBGP Provinsi Jawa Barat No. 0666/B7.2/OT.01.00/2023 tentang Rencana Strategis Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024, BBGP Provinsi Jawa Barat menetapkan sasaran, indikator dan target selama lima tahun. Pada tahun 2024 terdapat reuiu Renstra mengenai penambahan Indikator

Kinerja Kegiatan pada BBGP Jawa Barat khusus mewadahi untuk SEAMEO Qitep in Science dan SEAMEO Qitep in Language dan juga perubahan target/sasaran.

Berikut Renstra dan Reviu Renstra BBGP Jawa Barat dengan menetapkan sasaran, indikator dan target sebagai berikut:

Tabel 1.2 Renstra dan Reviu Renstra BBGP Jawa Barat

No.	Sasaran Kegiatan /Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renstra				Reviu Renstra			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Akhir Renstra	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Akhir Renstra
1	S.K 1. Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan									
	IKK 1.1 Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru	orang	6.495	8.660	17.320	32.475	6.495	8.660	17.320	32.475
	IKK 1.2 Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya	orang	40.714	40.714	40.714	122.142	40.714	40.714	49.935	131.363
	IKK 1.3 Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru	orang	2.712	3.382	3.382	9.476	2.712	3.382	9.195	15.289
	IKK 1.4 Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/pengembangan pendidikan bidang pendidikan bidang Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Bahasa di kawasan Asia Tenggara	orang							3.000	3.000
2	S,K 2Meningkatnya tata kelola BBGP Provinsi Jawa Barat									
	IKK 2.1 Predikat SAKIP BBGP Provinsi Jawa Barat	Predikat	A	A	A		A	A	A	
	IKK 2.2 Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L BBGP Provinsi Jawa Barat	Nilai	99	95	95		99	95	95	

Tabel 1.3 Target dan Capaian Renstra BBGP Jawa Barat Tahun 2022-2024

No.	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renstra	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Total Realisasi	Capaian pada Renstra
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	S.K 1. Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan										
	IKK 1.1 Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru	orang	32.475	6.495	8.996	8.660	11.117	17.320	17.334	37.447	115,31%
	IKK 1.2 Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya	orang	131.363	40.714	39.076	40.714	49.934	49.935	50.177	139.187	105,96%
	IKK 1.3 Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru	orang	15.289	2.712	5.457	3.382	9.190	9.195	10.822	25.469	166,58%
	IKK 1.4 Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/pengembangan pendidikan bidang Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Bahasa di kawasan Asia Tenggara	orang	3.000					3.000	3.598	3.598	119,93%
2	S.K 2 Meningkatnya tata kelola BBGP Provinsi Jawa Barat										
	IKK 2.1 Predikat SAKIP BBGP Provinsi Jawa Barat	Predikat	A	A	-	A	A	A	A	A	100%
	IKK 2.2 Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L BBGP Provinsi Jawa Barat	Nilai	95	99	-	95	94,35	95	96,38	96,38	101,45%

Sebagai satuan kerja yang baru terbentuk di tengah tahun anggaran 2022, akuntabilitas kinerja merupakan salah 1 (satu) dari 8 (delapan) program yang wajib dilakukan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Adapun rincian

capaian kinerja untuk IKK.1.1 Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru tahun 2022 sebesar 8.996, tahun 2023 sebesar 11.117, tahun 2024 sebesar 17.334 dengan total capaian 37.447 melebihi target akhir renstra sebesar 32.475. sedangkan untuk IKK 1.2 Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensi tahun 2022 sebesar 39.582, tahun 2023 sebesar 49.934, tahun 2024 sebesar 50.177 dengan total capaian 139.693 melebihi target akhir renstra sebesar 131.363. untuk IKK.1.3 Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru tahun 2022 sebesar 5.457, tahun 2023 sebesar 9.190, tahun 2024 sebesar 10.822 dengan total capaian 25.469 melebihi target akhir renstra sebesar 15.289. sedangkan IKK.1.4 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/pengembangan pendidikan bidang Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Bahasa di kawasan Asia Tenggara tahun 2022 dan tahun 2023 tidak ada karena baru ada di tahun 2024 dengan ketercapaian sebesar 3.598 melebihi target renstra sebesar 3.000. Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, perolehan rata-rata predikat SAKIP belum menjadi indikator kinerja kegiatan yang akan dicapai Hal ini, karena SAKIP BBGP Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, belum melalui proses penilaian LHE (Laporan Hasil Evaluasi) sedangkan nilai SAKIP tahun 2023-2024 sama seperti target yaitu A. Terakhir untuk IKK.2.2 Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal tahun 2022 sebesar 92,27, tahun 2023 94,35 dan tahun 2024 sebesar 96,38 dengan target renstra 95

Pada tabel tersebut di atas, Secara umum, capaian renstra BBGP Jawa Barat tahun 2022-2024 mencapai target yang ditetapkan dan sejumlah indikator yang menunjukkan keberhasilan dalam arti realisasi melebihi target yaitu persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi GTK. Berbagai inovasi yang dilakukan untuk peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan menjadi salah satu faktor yang menunjang keberhasilan program Guru dan Tenaga Kependidikan

BBGP Jawa BARat telah mencapai predikat SAKIP A dan rata-rata kinerja di atas 90%. Dalam hal ini, satuan kerja telah memiliki kinerja baik dan capaian program di atas target yang telah ditetapkan. Pemenuhan target dan capaian kinerja lembaga, dapat menjadi baseline bagi satuan kerja baru yakni BBGP Provinsi Jawa Barat

1.3 Isu-isu Strategis Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan

Seiring dengan selesainya periode Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2022-2024, dapat dikatakan bahwa BBGP Jawa Barat telah melaksanakan program kegiatan berdasarkan target/sasaran kinerja yang ditetapkan dengan optimal. Selanjutnya, memasuki periode arah dan kebijakan baru, yaitu Renstra Tahun 2025-2029, dimana mengacu kepada Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Arah kebijakan baru tersebut tentunya akan memiliki program, target, sasaran kinerja dan anggaran yang baru dan mendukung peningkatan kualitas bidang pendidikan dan kebudayaan.

Dalam rangka mendukung program prioritas BBGTK Provinsi Jawa Barat telah menyelesaikan program inovasi sesuai kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan di provinsi Jawa Barat. Menindaklanjuti capaian pelaksanaan program nasional maupun program lembaga dan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi BBGTK Provinsi Jawa Barat, maka dapat

ditetapkan beberapa isu strategis pelaksanaan program peningkatan kompetensi GTK di provinsi Jawa Barat sebagai berikut.

1. Peningkatan Akses Guru dan Tenaga Kependidikan untuk Mengikuti Peningkatan Kompetensi Berkelanjutan di BBGTK Jawa Barat

Peningkatan keterampilan belajar mengajar bagi guru, peningkatan kompetensi dalam pengelolaan satuan pendidikan bagi kepala sekolah dan peningkatan kompetensi pendampingan satuan pendidikan perlu dilakukan oleh seluruh GTK di Jawa Barat. Namun belum semua guru dan tenaga kependidikan memiliki kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya melalui pelatihan yang dikembangkan oleh BBGTK Jawa Barat.

2. Peningkatan Konsistensi GTK dalam Mengimplementasikan Kompetensi Hasil Pelatihan di Sekolah

Program peningkatan kompetensi melalui Pelatihan untuk GTK adalah pelatihan yang untuk mendorong GTK menjadi lebih profesional dan memaksimalkan program sekolah atau pembelajaran di kelas menjadi lebih berdampak pada siswanya. GTK belum menjalankan hasil pelatihan dengan optimal, sehingga tidak berdampak signifikan pada peningkatan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Kondisi ini menunjukkan bahwa Belajar melalui pelatihan belum dimaknai sebagai kebutuhan oleh semua GTK, di mana para GTK mengikuti pelatihan hanya menggugurkan tugas dari pimpinan. Para GTK belum terbiasa melakukan refleksi pembelajaran pasca pelatihan yang diikuti.

3. Peningkatan Inisiatif GTK untuk Melakukan Peningkatan Kompetensi Berkelanjutan Melalui Komunitas Sekolah (Pembelajar Sepanjang Hayat)

Peningkatan kompetensi GTK menjadi kunci utama dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas dan berdampak positif pada peserta didik. Dalam menjalankan perannya, GTK perlu terus meningkatkan kemampuan dan kompetensi diri agar dapat selalu meningkatkan kualitas layanan terhadap peserta didik. Selain itu, perkembangan zaman yang terus berubah berdampak pula pada dunia pendidikan yang perlu terus menyesuaikan sesuai dengan zamannya. Oleh karena itu, GTK harus terdorong motivasinya untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan diri secara terus menerus. Salah satu sarana yang dapat digunakan GTK dalam meningkatkan kemampuan diri adalah komunitas belajar. Komunitas belajar ini merupakan belajar menjadi sarana dalam mengembangkan serta meningkatkan kompetensi GTK; (1) memfasilitasi belajar bersama sehingga lebih mudah memahami perkembangan pedagogis terbaru yang implementatif. (2) Memfasilitasi diskusi pemecahan masalah pembelajaran/sekolah dan juga bisa saling berbagi praktik baik tentang implementasi pembelajaran/program sekolah yang berkualitas. (3) Memfasilitasi kolaborasi pengembangan perangkat ajar/rencana pengembangan sekolah sehingga dapat lebih memperkaya produk-produk perangkat ajar/program sekolah yang implementatif (4) Memfasilitasi refleksi program pembelajaran/sekolah dengan rekan sejawat. Refleksi berdasarkan implementasi merupakan bagian penting untuk mengevaluasi proses dari penerapan strategi pembelajaran/program sekolah sehingga dapat lebih memperkaya memperkaya pengalaman belajar dari anggota Komunitas Belajar.

4. Peningkatan Sinergitas Antara Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi dan BBGTK Provinsi Jabar dalam Menindaklanjuti Hasil Pelatihan

Masih diperlukannya optimalisasi GTK dalam mengimplementasikan hasil pelatihannya secara nyata di sekolah. Salah satu cara untuk dapat menjamin implementasi hasil pelatihan dengan baik adalah melibatkan peran dinas pendidikan di daerah. Hal ini karena dinas pendidikan

memiliki jangkauan yang lebih dekat dengan sekolah. Oleh karena itu, peran dinas pendidikan dalam penjaminan hasil pelatihan ini perlu disinergikan dengan program-program yang telah dilaksanakan oleh BBGTK Jawa Barat.

Dalam menghadapi isu strategis ini, BBGTK Jawa Barat berperan dalam hal :

1. Memfasilitasi peningkatan kompetensi bagi Guru dan Tenaga Kependidikan, diantaranya melalui platform yang dimiliki yaitu Diklat Daring Calakan, dimana setiap guru dan tenaga kependidikan dapat mengakses diklat secara terbuka tanpa harus meninggalkan tuisi di sekolah; Webinar dengan topik-topik yang relevan; dan Pojok Komunitas GTK melalui skema kemitraan, yaitu komunitas belajar sekolah, komunitas GTK, dan Dinas pendidikan dapat mengajukan belajar bersama secara luring di kantor BBGP Jawa Barat yang difasilitasi oleh tenaga akademik BBGP Jawa Barat.
2. Melakukan program pendampingan pasca pelatihan yang intensif sehingga para GTK dapat melaksanakan hasil belajar di sekolahnya dan memberikan dampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik
3. Mengembangkan serta meningkatkan kompetensi diri GTK melalui komunitas belajar, dengan melakukan pemetaan komunitas belajar berdasarkan kemampuan dan aktivitasnya, meningkatkan kemampuan komunitas belajar dalam menyelenggarakan PKB di komunitas serta melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi terhadap komunitas belajar Secara mandiri atau kelompok untuk melakukan perbaikan
4. Menjalin kemitraan, menginisiasi, membangun jejaring melalui koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas dalam rangka percepatan transformasi satuan pendidikan.

1.4 Potensi dan Permasalahan

Setelah diidentifikasi isu strategis yang menjadi fokus pengembangan dan implementasi pelaksanaan program nasional dan program lembaga. Untuk tahap selanjutnya dapat dilakukan mitigasi terhadap permasalahan, analisis dan potensi yang ada di BBGTK Provinsi Jawa Barat.

1.4.1 Permasalahan

1. Permasalahan Internal

a. Tata Kelola Organisasi

Tata kelola organisasi yang baik diperlukan untuk mengatur dan mengendalikan hubungan antara pihak manajemen organisasi dengan seluruh pihak yang berkepentingan terhadap organisasi mengenai hak-hak dan kewajiban mereka sesuai dengan visi-misi organisasi. Perubahan nomenklatur dari BBGP menjadi BBGTK (Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan) berdampak pada perluasan cakupan tugas yang tidak lagi terbatas pada program guru penggerak, tetapi meliputi seluruh pengembangan profesional guru dan tenaga kependidikan secara lebih komprehensif. Dampak positifnya adalah peningkatan kualitas SDM pendidikan, penyelenggaraan program yang lebih beragam, fleksibel, dan relevan, serta guru dan tenaga kependidikan memiliki akses yang lebih luas terhadap pengembangan kompetensi berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penataan dan penguatan kembali terhadap tim kerja dan penerapan SOP menjadi tanggung jawab

organisasi untuk menyatukan visi bersama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang baru di bawah BBGTK Provinsi Jawa Barat.

b. Internalisasi Lembaga

Tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia, terutama karena perbedaan budaya kerja, ritme, dan komitmen dalam menjalankan tugas. Diperlukan penguatan kapasitas terhadap pegawai, sehingga dengan penyatuan pola pikir, budaya kerja, penyamaan persepsi, peningkatan integritas dan cepat dalam merespon kebutuhan konsumen dapat meningkatkan citra diri lembaga yang berdampak positif pada stakeholder lembaga.

c. Adaptasi pemahaman kebijakan

Bertambah luasnya peran dan cakupan lembaga setelah menjadi BBGTK (Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan) mencakup seluruh kategori tenaga kependidikan yang ada di sekolah, seperti tenaga administrasi, pustakawan, laboran, dan lainnya. Diperlukan pemahaman terhadap kebijakan baru dari semua unsur sehingga lembaga dapat berkontribusi melalui program inovasi yang selaras dan mendukung kebijakan program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Permasalahan di atas akan berimbas kepada :

1. Pemenuhan target perolehan predikat SAKIP.
2. Perolehan Nilai Kinerja Anggaran dalam pelaksanaan RKAKL sesuai target yang ditetapkan.
3. Perolehan predikat ZI-WBK/WBBM dalam pengelolaan Tata Kelola Lembaga.

2. Permasalahan Eksternal

- a. Sebagai lembaga baru, perlunya mensosialisasikan BBGTK Jawa Barat ke seluruh wilayah sasaran mengenai peran dan tanggung jawab yang baru.
- b. Akses terhadap peningkatan kompetensi GTK masih rendah
- c. Pengembangan keprofesian guru masih harus dioptimalkan. Hasil penelitian mengindikasikan pelatihan guru yang dilakukan secara masif dan searah kurang efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Seyogyanya peningkatan mutu guru dilakukan melalui proses belajar bersama rekan sejawat (peer learning) secara terus menerus dan hal ini dapat dioptimalkan melalui ekosistem belajar guru. Namun kondisi saat ini, ekosistem belajar guru juga belum optimal dikarenakan:
 - a) belum terbentuk adanya pemimpin pembelajaran yang mampu menggerakkan ekosistem belajar guru;
 - b) belum tersedianya intervensi program pemberdayaan ekosistem belajar guru yang berkesinambungan;
 - c) belum tersebarnya ekosistem belajar guru di setiap kabupaten/kota.

Permasalahan di atas akan berimbas kepada :

1. Sinergitas dengan pemangku kepentingan
2. Pengembangan keprofesian guru sesuai bidangnya belum didukung oleh inovasi pembelajaran secara optimal

1.4.2 Analisa Permasalahan

Dalam menyusun strategi pengelolaan lembaga, dilakukan analisa dalam berbagai aspek sebagai bahan referensi dan rekomendasi pengambilan keputusan dan penetapan langkah selanjutnya. Untuk mencari solusi permasalahan di atas, maka dilakukan analisis permasalahan dengan menggunakan teknik SWOT sebagai berikut.

1. Pemenuhan target perolehan predikat SAKIP.

Strength	Weakness
Memiliki SDM yang unggul dalam menangani SAKIP	Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar tim kerja dan kurangnya pemahaman unit kerja lain dalam pemenuhan data dukung laporan kinerja lembaga
Opportunities	Threat
Tersedianya data pengukuran kinerja yang mendukung aplikasi spasikita	Petugas terlambat menangani data kinerja karena terganggu dengan pekerjaan tambahan lainnya

2. Perolehan Nilai Kinerja Anggaran dalam pelaksanaan RKAKL sesuai target yang ditetapkan.

Strength	Weakness
Memiliki SDM yang unggul dalam menangani NKA (realisasi anggaran)	Ketidakkonsistenan SDM dalam mengelola / melaksanakan realisasi anggaran sesuai dengan target yang ditetapkan
Opportunities	Threat
Tersedianya aplikasi dan media yang membantu penilaian anggaran	Penanganan masalah keuangan tidak mempertimbangkan dampak pada nilai kinerja anggaran

3. Perolehan predikat ZI-WBK/WBBM dalam pengelolaan Tata Kelola Lembaga.

Strength	Weakness
Adaptif terhadap perubahan dan tuntutan zaman	Dampak penggabungan lembaga, sebagian masih dalam taraf adaptasi budaya kerja yang baru (masih ada yang sulit menerima perubahan budaya kerja)
Opportunities	Threat
Peluang meraih predikat ZI-WBBM	Mempertahankan ZI-WBK, Pegawai menerapkan budaya lama (tidak ada konsistensi budaya baru)

4. Program Inovasi

Strength	Weakness
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki tenaga fungsional yang mempunyai latar belakang pendidikan berbagai mapel, kompeten dan berpengalaman dalam mengajar dan menyelenggarakan pembelajaran 2. Memiliki tenaga fungsional yang kompeten dan berpengalaman dalam melakukan penelitian dan mengembangkan desain pelatihan dalam berbagai moda pembelajaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terbuka wawasan dan memahami kebijakan kementerian 2. Integritas SDM menurun (tidak sesuai dengan konteks penugasannya)
Opportunities	Threat
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pusat yang mendukung peningkatan kompetensi SDM 2. Kolaborasi antar UPT Kemendikdasmen di Jawa Barat 3. GTK antusias untuk mendapatkan layanan peningkatan kompetensi dari BBGTK 4. Membangun citra lembaga, membuka akses GTK dan mempunyai makna yang mendalam bukan sekedar pelatihan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan daerah tentang peningkatan kompetensi GTK yang memungkinkan mendapatkan layanan diluar BBGTK 2. Banyak model peningkatan kompetensi GTK diluar Kemendikdasmen 3. Program inovasi tidak terdukung SDM Lembaga (menangani beberapa kegiatan dalam waktu bersamaan)

1.4.3 Potensi

Berdasarkan analisis yang dilakukan atas potensi unit kerja dapat diidentifikasi potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh BBGTK Provinsi Jawa Barat

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM BBGTK Provinsi Jawa Barat sebagian besar berusia produktif dan adaptif terhadap penggunaan teknologi informasi. Hal ini tentu merupakan modal yang baik dalam menunjang pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan.

2. Sarana dan Prasarana

BBGTK Provinsi Jawa Barat memiliki berbagai sarana prasarana yang dapat menunjang kinerja organisasi. Sarana dan prasarana tersebut antara lain:

- a. Memiliki 2 lokasi Gedung perkantoran yang cukup nyaman dan luas sebagai tempat yang kondusif untuk melaksanakan aktivitas kerja bagi pegawai.
- b. Ruang kelas yang memadai untuk digunakan sebagai tempat pendidikan dan pelatihan.
- c. Wisma sebagai asrama tempat menginap bagi peserta pendidikan dan pelatihan yang nyaman.
- d. Fasilitas gedung pertemuan, ruang makan, tempat ibadah, laboratorium, perpustakaan, dan halaman yang cukup asri
- e. Jaringan internet dan alat komunikasi yang baik.
- f. Sistem Informasi Manajemen yang handal.

3. Pengembangan Program

Memiliki berbagai program unggulan di 3 (tiga) eks PPPPTK sesuai dengan bidang dan wilayah kerja masing masing, akan menjadi kekayaan bagi BBGTK Provinsi Jawa Barat. Potensi ini akan menjadi modal bagi BBGTK Provinsi Jawa Barat dalam menyusun strategi program dan anggaran yang mampu melayani semua sasaran GTK di provinsi Jawa Barat.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BBGTK PROVINSI JAWA BARAT

2.1 Visi BBGTK Provinsi Jawa Barat

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kemendikdasmen yang berada di bawah Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Ditjen GTKPG), BBGTK Provinsi Jawa Barat mendukung visi Kemendikdasmen dan Ditjen GTKPG.

Kemendikdasmen sebagai Kementerian yang mengemban amanat pembangunan SDM untuk meningkatkan mutu pendidikan, menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis tahun 2025—2029 sebagai berikut:

Visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah				
Terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045				
Misi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, berkualitas, berdaya saing, dan relevan yang didukung dengan sarana dan prasarana memadai, sistem pembelajaran berkualitas, serta teknologi pembelajaran 2. Mewujudkan kedaulatan Bahasa Indonesia melalui pembangunan kebahasaan dan kesastraan 3. Mengoptimalkan kerja sama, kolaborasi, dan peran seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan 				
Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah				
Tujuan 1: Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan	Tujuan 2: Menguatnya mutu layanan pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan	Tujuan 3: Meningkatnya kualitas pembangunan kebahasaan dan kesastraan serta pengarusutamaannya dalam dunia pendidikan dan masyarakat	Tujuan 4: Meningkatnya mutu layanan dan relevansi pendidikan vokasi	Tujuan 5: Menguatnya sistem tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya akses layanan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan untuk semua	Sasaran Strategis 2: Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan	Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kualitas pembangunan kebahasaan dan kesastraan	Sasaran Strategis 4: Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan vokasi	Sasaran Strategis 5: Meningkatnya tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Gambar 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi

Sumber: Renstra Kemendikdasmen 2025—2029

Didasarkan pada visi Kemendikdasmen tahun 2025—2029, Ditjen GTKPG merumuskan visi yang menjadi acuan dalam menentukan arah perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta pendidikan profesi guru selama kurun 5 (lima) tahun pada periode Renstra tahun 2025—2029. Rumusan visi Ditjen GTKPG tahun 2025—2029 adalah:

“Terwujudnya guru dan tenaga kependidikan berkualitas dalam rangka mendukung Visi Kemendikdasmen yaitu terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, BBGTK Provinsi Jawa Barat melaksanakan tugas dan kewenangan dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK (berorientasi pelayanan, Akuntabel, Komitmen, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif), memberikan pelayanan dengan RAMAH (Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis) dan SANTUN (Setia, Amanah, Negarawan, Teladan, Unggul, dan Ngemong), serta menanamkan Budaya Kerja JUARA (Jujur, Unggul, Adaptif, Ramah, dan Amanah). Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas melaksanakan peningkatan kompetensi bagi Guru dan Tenaga Kependidikan akan mengedepankan inovasi dan pelayanan prima kepada para stakeholders. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan seluruh pemangku kepentingan terkait bekerja bersama untuk memajukan pendidikan sesuai dengan visi dan misi presiden.

2.2 Misi BBGTK Provinsi Jawa Barat

Ditjen GTKPG melaksanakan 2 (dua) misi Kemendikdasmen terkait guru, tenaga kependidikan dan pendidikan guru, yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan guru dan tenaga kependidikan berkualitas yang didukung dengan pendidikan profesi guru, peningkatan kompetensi dan kualifikasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan tata kelola guru dan tenaga kependidikan yang baik.
2. Mengoptimalkan kerjasama, kolaborasi, dan peran seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung terwujudnya guru dan tenaga kependidikan berkualitas.

Sesuai tugas dan kewenangannya, BBGTK Provinsi Jawa Barat turut mendukung misi Kemendikdasmen dan misi Ditjen GTKPG terkait peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dengan rumusan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah di wilayah provinsi jawa barat yang kompeten dan berkualitas;
2. Mengoptimalkan kerjasama, kolaborasi, dan peran seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung terwujudnya guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah di wilayah provinsi jawa barat berkualitas.

2.3 Tujuan BBGTK Provinsi Jawa Barat

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kemendikdasmen, BBGTK Provinsi Jawa Barat merumuskan tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun periode Renstra. Perumusan tujuan BBGTK Provinsi Jawa Barat sejalan dengan tujuan Ditjen GTKPG ditujukan untuk menggambarkan penjabaran atas visi dalam rangka pencapaian sasaran strategis Kemendikdasmen sesuai dengan tugas dan fungsi BBGTK Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan BBGTK Provinsi Jawa Barat

No	Tujuan BBGTK Provinsi Jawa Barat	Indikator Tujuan BBGTK Provinsi Jawa Barat
1	Peningkatan kualitas pembelajaran, kompetensi, dan karakter pada pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal

2	Peningkatan kualitas tata kelola Kementerian	1. Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru 2. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru
---	--	--

2.4 Sasaran Strategis BBGTK Provinsi Jawa Barat

BBGTK Provinsi Jawa Barat menetapkan dua sasaran strategis sesuai tugas dan kewenangannya yang telah dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan yang akan dicapai tahun 2029, yaitu:

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis BBGTK Provinsi Jawa Barat

No	Tujuan BBGTK Provinsi Jawa Barat	Sasaran Strategis BBGTK Provinsi Jawa Barat
1	Peningkatan kualitas pembelajaran, kompetensi, dan karakter pada pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan	Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan. Indikator: Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran
2	Peningkatan kualitas tata kelola Kementerian	Meningkatnya tata kelola Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat. Indikator: 1. Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal A; 2. Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal sangat baik

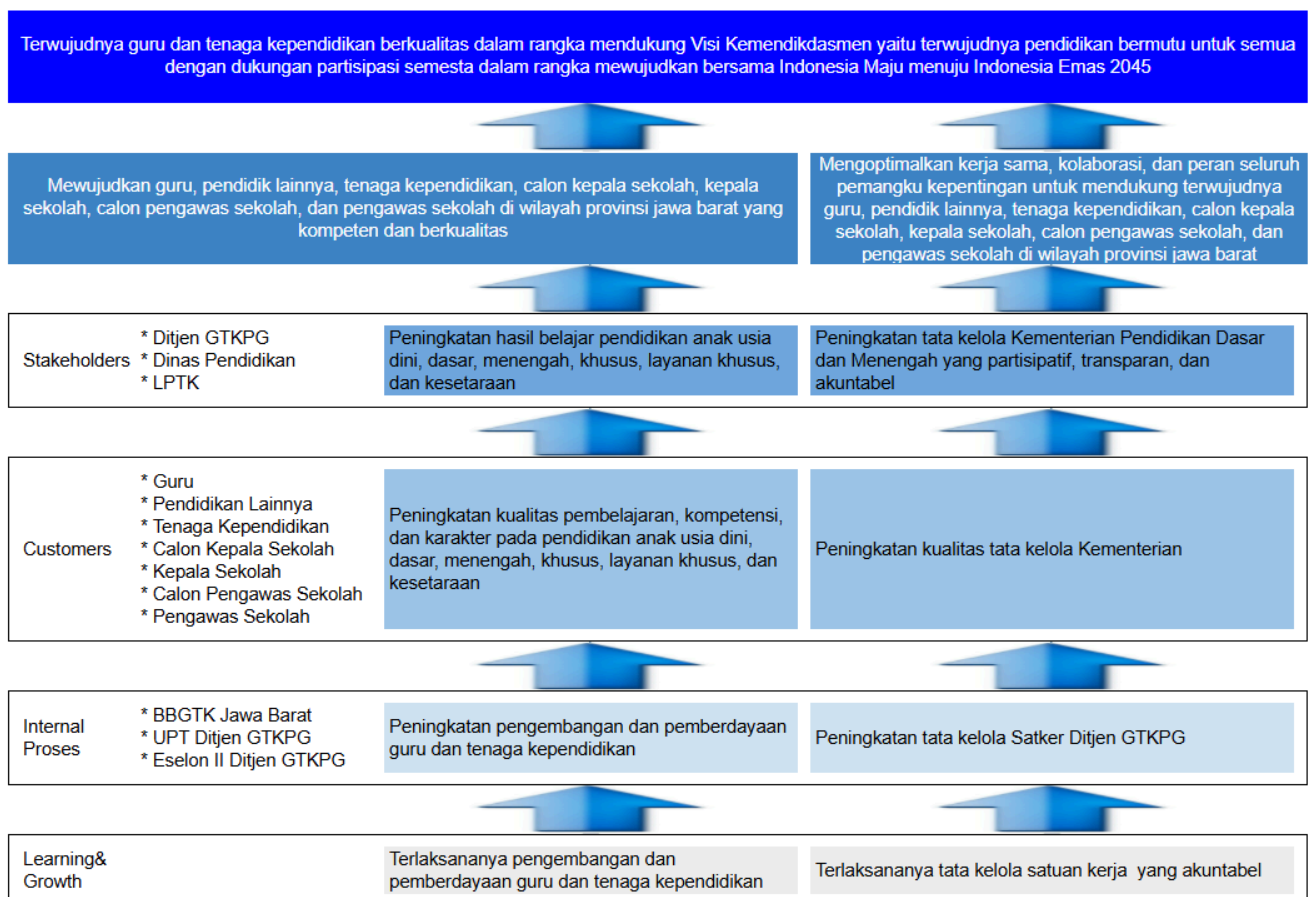
Berdasarkan Sasaran Strategis di atas, BBGTK Provinsi Jawa Barat mengidentifikasi indikasi risiko yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Risiko-risiko tersebut dapat berindikasi pada ketercapaian Sasaran Strategis Kemendikdasmen. Adapun indikasi risikonya berdasarkan Sasaran Strategis sebagai berikut.

Tabel 2.3 Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Indikasi Risiko

No	Sasaran Strategis BBGTK Provinsi Jawa Barat	Indikasi Risiko
1	Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan	1. Peningkatan kompetensi dan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan tidak didasarkan pada analisis kebutuhan guru dan peserta didik sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran serta hasil belajar siswa.
2	Meningkatnya tata kelola Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat	a. Target atau sasaran kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja tidak tercapai.

		<p>b. Pengukuran kinerja tidak dilakukan secara berjenjang dari level individu hingga unit kerja dan tidak dimanfaatkan secara efektif sebagai alat evaluasi dan pengambilan keputusan.</p> <p>c. Kurangnya komitmen terhadap upaya perbaikan tata kelola dan reformasi birokrasi.</p>
--	--	--

Mengacu kepada peta strategi Ditjen GTK, Gambaran strategi BBGTK Jawa Barat dalam pencapaian tujuan digambarkan dalam bentuk Peta Strategi yang menggambarkan sejumlah sasaran yang saling terkait dalam kerangka hubungan sebab akibat dalam mewujudkan visi dan misi. Dalam penyusunan Peta Strategi, BBGTK Jawa Barat menggunakan kerangka logis, penjenjangan kinerja dan sistem manajemen strategis untuk memantau dan mengevaluasi kinerja organisasi melalui empat strategi/perspektif yaitu perspektif pemangku kepentingan (stakeholders), perspektif pengguna layanan (customer), perspektif proses internal (internal process), dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth).



Gambar 2.2 Peta Strategi BBGTK Jawa Barat Tahun 2025—2029

Perspektif *stakeholder* merupakan sasaran strategis yang ingin diwujudkan untuk memenuhi harapan *stakeholder* atau pemangku kepentingan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang *stakeholder*. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas output atau outcome, namun tidak menggunakan layanan secara langsung.

Perspektif *customer* merupakan sasaran strategis yang ingin diwujudkan untuk memenuhi harapan *customer* atau pengguna layanan. Pengguna layanan yang dimaksud adalah pihak eksternal yang terkait langsung dengan pelayanan Kementerian.

Perspektif internal process merupakan sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola Direktorat Jenderal dalam memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan dan pengguna layanan.

Perspektif learning and growth (pembelajaran dan pertumbuhan) merupakan sasaran strategis yang berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan output atau outcome yang sesuai dengan harapan pengguna layanan dan pemangku kepentingan.

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan merupakan pedoman dan rangkaian prioritas pembangunan yang menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Arah kebijakan ini berfungsi untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan. Dalam Renstra, arah kebijakan merupakan pedoman atau panduan yang mengarahkan rumusan strategi dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Arah kebijakan ini menjadi dasar dalam menentukan pilihan strategi dan merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun periode Renstra.

Arah kebijakan dan strategi nasional yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025—2029 memuat delapan Prioritas Nasional yang merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Delapan Prioritas Nasional tersebut adalah:

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dari delapan Prioritas Nasional tersebut, arah kebijakan dan strategi Kemendikdasmen selaras dengan Prioritas Nasional 4 dan Prioritas Nasional 8. Dalam Prioritas Nasional 4, untuk mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata dan untuk mewujudkan penguatan iptek, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja, arah kebijakan dalam program pembangunan adalah:

1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
2. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran.
3. Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas.

4. Penguatan sistem tata kelola pendidikan.
5. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja.

Dalam Prioritas Nasional 8, untuk mewujudkan kehidupan beragama yang maslahat dan berkebudayaan maju, arah kebijakan dan strategi dalam program pembangunan adalah pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa.

Sasaran Prioritas Nasional Ditjen GTKPG selaras dengan Prioritas Nasional 4, arah kebijakan dalam program pembangunan yang menjadi fokus utama adalah peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran serta penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas. Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 4, intervensi pada masing-masing arah kebijakan yang relevan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran diarahkan untuk mewujudkan proses pembelajaran yang berfokus pada peserta didik sehingga mampu mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*). Selain itu, kebijakan ini mendorong penciptaan iklim pembelajaran yang baik sehingga proses belajar diharapkan menjadi wahana membangun SDM yang unggul dan berdaya saing. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran dilakukan melalui:
 - a. Pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern (*pedagogical technology content knowledge/PTCK*);
 - b. Penciptaan ekosistem satuan pendidikan yang mendukung proses pembelajaran berkualitas, termasuk peningkatan kecakapan literasi kelas awal, serta penguatan karakter dan *wellbeing* peserta didik dan pendidik;
2. Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas diarahkan untuk memenuhi dan meningkatkan pemerataan pendidik di seluruh wilayah serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Kebijakan ini memastikan bahwa pendidik berkualitas terdistribusi secara merata, termasuk di daerah afirmasi. Intervensi kebijakan ini akan dilakukan melalui:
 - a. Reformasi pendidikan keguruan melalui penguatan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan revitalisasi Pendidikan Profesi Guru (PPG); dan
 - b. Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, *in-service training*), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kemendikdasmen dan Ditjen GTKPG

Untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua dan mendukung keberlanjutan program Prioritas Nasional, arah kebijakan Kemendikdasmen adalah sebagai berikut:

- a. Perluasan layanan pendidikan dasar dan menengah dalam mendukung pendidikan bermutu untuk semua yang berkeadilan;
- b. Penguatan layanan PAUD dan 1 (satu) tahun prasekolah;
- c. Penguatan mutu layanan, dan kualitas pembelajaran dan pengajaran, kurikulum dan model pembelajaran, serta penilaian pendidikan;
- d. Penguatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. Peningkatan kualitas pendidikan vokasi;

- f. Pembangunan kebahasaan dan kesastraan bahasa daerah dan penginternasionalan Bahasa Indonesia;
- g. Penguatan pembiayaan dan tata kelola pendidikan;
- h. Penguatan tata kelola serta akuntabilitas Kementerian.

Kebijakan Kemendikdasmen yang menjadi fokus utama Ditjen GTKPG serta arah kebijakan dan strategi Ditjen GTKPG adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kemendikdasmen dan Ditjen GTKPG

No	Arah Kebijakan dan Strategi Kemendikdasmen terkait Ditjen GTKPG	Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen GTKPG
1	<p>Penguatan mutu layanan, dan kualitas pembelajaran dan pengajaran, kurikulum dan model pembelajaran, serta penilaian pendidikan. beberapa intervensi atau strategi yang dilakukan adalah:</p> <p>penguatan penerapan model pembelajaran yang berfokus pada penguatan kompetensi dasar peserta didik, seperti literasi, numerasi, serta pendidikan matematika, sains, teknologi sejak usia dini</p> <p>peningkatan kualitas pembelajaran berbasis Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM), serta penguasaan koding dan pemanfaatan kecerdasan artifisial</p> <p>penerapan pembelajaran yang mendorong penguatan karakter, dan memperhatikan psikososial anak, serta penciptaan lingkungan belajar peserta didik yang aman dan kondusif antara lain dengan penguatan kualitas bimbingan konseling dan pendidikan nilai untuk guru, dan penanaman Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.</p>	<p>Arah kebijakan dalam rangka mendukung penguatan mutu layanan, dan kualitas pembelajaran dan pengajaran, kurikulum dan model pembelajaran, serta penilaian pendidikan adalah:</p> <p>penguatan pendidikan karakter dan Kesehatan Sekolah, meliputi pelatihan bimbingan konseling dan pendidikan nilai untuk guru kelas, serta peningkatan kompetensi guru (PKG) bimbingan konseling (BK). Beberapa upaya yang dilakukan adalah:</p> <p>(1) peningkatan kompetensi guru pendidikan khusus (GPK) inklusi,</p> <p>(2) GTK yang mendapatkan pendampingan pembelajaran,</p> <p>(3) PKG bagi guru kelas dan guru Mapel lain serta guru BK</p>
2	<p>Penguatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Beberapa intervensi atau strategi yang dilakukan adalah:</p> <p>peningkatan kualitas tata kelola guru dan tenaga kependidikan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan, mendorong distribusi dan redistribusi berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan, penataan jenjang karir, pelaksanaan penilaian kinerja dan kompetensi guru dan program afirmasi bagi guru dan tenaga kependidikan di daerah khusus, selain itu uji kompetensi guru perlu dilakukan secara periodik untuk memastikan tingkat kompetensi guru sesuai standar kualitas</p>	<p>Arah kebijakan dalam rangka mendukung penguatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan adalah:</p> <p>peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru meliputi peningkatan kualifikasi minimal D4/S1, pelatihan kompetensi guru, dan peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi. Beberapa upaya yang dilakukan adalah:</p> <p>(1) Diklat berjenjang guru pendidikan anak usia dini (PAUD),</p> <p>(2) program kepemimpinan sekolah,</p> <p>(3) pendidikan profesi guru,</p> <p>(4) Afirmasi Kualifikasi S1/D4,</p> <p>(5) pengembangan karir dan penghargaan GTK, dan</p> <p>(6) penataan GTK</p>

	<p>mendorong pengembangan kurikulum pembelajaran guru yang mencakup penguatan di bidang literasi, numerasi, sains, dan teknologi, pembelajaran mendalam, koding, kecerdasan artifisial, Pendidikan karakter, dan kesehatan sekolah</p> <p>penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan mendorong pemenuhan kualifikasi akademik minimal untuk guru S1/D-IV</p> <p>pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS) dan pendekatan pelatihan berbasis pembelajaran mendalam</p> <p>peningkatan kualitas kepemimpinan sekolah untuk mendorong terwujudnya upaya positif dalam perbaikan kualitas belajar mengajar, dan kualitas satuan pendidikan secara menyeluruh</p> <p>peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan</p> <p>pemberian perlindungan dan penghargaan yang layak bagi guru dan tenaga kependidikan</p> <p>penyediaan guru dan tenaga pendidik untuk mendukung program sekolah rakyat</p> <p>penguatan pembelajaran kelas rangkap yang terutama dapat diterapkan pada kondisi satuan pendidikan dengan keterbatasan pendidik dan murid, sarana dan prasarana pendidikan yang terbatas, serta memastikan keberlangsungan pembelajaran di daerah terpencil dengan sumber daya terbatas, dengan mengedepankan ketercapaian pembelajaran berpusat pada anak</p>	<p>penguatan pendidikan literasi, numerasi, dan sains teknologi meliputi pendidikan matematika, sains, teknologi sejak dini, dan peningkatan kecakapan literasi. Beberapa upaya yang dilakukan adalah:</p> <p>(1) peningkatan kompetensi GTK untuk inovasi pembelajaran,</p> <p>(2) PKG Bahasa Inggris, dan</p> <p>(3) PKG MIPA/PISA.</p>
3	<p>Penguatan tata kelola serta akuntabilitas Kementerian. Beberapa intervensi atau strategi yang dilakukan adalah:</p> <p>Memberikan pelayanan yang RAMAH (Responsif, Adaptif, Melayani, Akuntabel, dan Harmonis) dan SANTUN (Setia, Amanah, Negarawan, Teladan, Unggul, dan Ngemong)</p> <p>Memastikan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pendidikan yang transparan di tingkat pusat dan daerah</p>	<p>Arah kebijakan dalam rangka mendukung penguatan tata kelola dan akuntabilitas Kementerian adalah penguatan tata kelola dan akuntabilitas Ditjen GTKPG. Beberapa upaya yang dilakukan adalah:</p> <p>peningkatan layanan dukungan manajemen internal Ditjen GTKPG melalui budaya kerja organisasi dan budaya kerja pegawai; penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); ASN profesional dan berintegritas; layanan publik yang cepat, bersih, dan berkeadilan; pengelolaan sumber daya baik aset maupun manusia yang efektif dan efisien; dan mengoptimalkan kerja sama, kolaborasi dan peran seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Kemendikdasmen.</p> <p>penguatan implementasi SAKIP Ditjen GTKPG melalui keterlibatan pimpinan secara langsung dalam penguatan budaya akuntabilitas, penyusunan perencanaan, penetapan target kinerja, pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala, melakukan upaya perbaikan berkelanjutan, penyediaan data dan informasi yang handal dan mudah diakses, serta perencanaan program dan anggaran berbasis kinerja yang berkualitas</p>

Melanjutkan reformasi struktural Kementerian untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja unit kerja	birokrasi Ditjen GTKPG yang adaptif dan inovatif melalui penguatan komitmen pimpinan sebagai teladan dan mendukung perubahan, transparansi dan akuntabilitas, perubahan pola pikir dan budaya organisasi serta pelayanan publik yang berkualitas.
--	---

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi BBGTK Provinsi Jawa Barat

Arah kebijakan pada Rencana Strategis BBGTK Provinsi Jawa Barat selaras dengan arah kebijakan Kemendikdasmen dan arah kebijakan Ditjen GTKPG serta strategi nasional untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua dan berkeadilan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BBGTK Jawa Barat merumuskan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

Tabel 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BBGTK Jawa Barat

No	Arah Kebijakan dan Strategi BBGTK Jawa Barat
1	<p>Arah kebijakan dalam rangka mendukung penguatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan adalah:</p> <p>1) peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan meliputi pelatihan peningkatan kompetensi serta pengelolaan administrasi guru dan tenaga kependidikan. Beberapa upaya yang dilakukan adalah: (1) Diklat berjenjang guru pendidikan anak usia dini (PAUD), (2) pelatihan BCKS, (3) pelatihan pembelajaran mendalam (PM) (4) pelatihan coding dan kecerdasan artificial (KKA) (5) Program Inovasi lainnya (6) Pengelolaan administrasi profesi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah</p> <p>2) penguatan pendidikan literasi, numerasi, dan sains teknologi meliputi pendidikan matematika, sains, teknologi sejak dini, dan peningkatan kecakapan literasi. Beberapa upaya yang dilakukan adalah: (1) peningkatan kompetensi GTK untuk inovasi pembelajaran, (2) PKG Bahasa Inggris, dan (3) PKG MIPA/PISA.</p>
2	<p>Arah kebijakan dalam rangka mendukung penguatan tata kelola dan akuntabilitas Kementerian adalah penguatan tata kelola dan akuntabilitas BBGTK Jawa Barat. Beberapa upaya yang dilakukan adalah:</p> <p>1) peningkatan kinerja anggaran BBGTK Jawa Barat dengan predikat sangat baik yang terdiri dari aspek kualitas perencanaan anggaran, aspek kualitas pelaksanaan anggaran, serta aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran</p> <p>2) penguatan implementasi SAKIP BBGTK Jawa Barat melalui keterlibatan pimpinan secara langsung dalam penguatan budaya akuntabilitas, penyusunan perencanaan, penetapan target kinerja, pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala, melakukan upaya perbaikan berkelanjutan, penyediaan data dan informasi yang handal dan mudah diakses, serta perencanaan program dan anggaran berbasis kinerja yang berkualitas</p> <p>3) birokrasi BBGTK Jawa Barat yang adaptif dan inovatif melalui pencapaian zona integritas wilayah bebas dari korupsi (ZI-WBK) serta menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)</p>

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi pada Renstra BBGTK Jawa Barat selaras dengan kerangka regulasi Ditjen GTK yang merupakan gambaran umum rencana peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta mendukung pencapaian tujuan strategis. Beberapa regulasi yang diprioritaskan untuk dilakukan penyesuaian atau perubahan periode tahun 2025—2029, adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3 Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
1	Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Integrasi dan harmonisasi regulasi berkaitan dengan pendidikan yang saat ini diatur oleh tiga regulasi utama, yaitu UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, dan UU Pendidikan Tinggi. Revisi UU Sisdiknas akan menyelaraskan peraturan-peraturan dalam bidang pendidikan sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara satu regulasi dengan regulasi lainnya	Tahun 2025 - 2026
2	Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah	<p>1. Mengubah persyaratan dan mekanisme penugasan guru sebagai kepala sekolah. Kebijakan yang saat ini berjalan mensyaratkan calon kepala sekolah untuk memiliki sertifikat guru penggerak. Syarat tersebut diganti menjadi sertifikat lulus pelatihan bakal calon kepala sekolah. Hal ini perlu mengubah ketentuan dalam Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.</p> <p>2. Beberapa muatan yang akan disampaikan dalam peraturan ini antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Syarat bakal calon kepala sekolah b. Penyiapan bakal calon kepala sekolah c. Mekanisme pelatihan bakal calon kepala sekolah d. Mekanisme pengangkatan dan penugasan calon kepala sekolah e. Mekanisme perpanjangan dan pemberhentian kepala sekolah f. Tugas dan beban kerja kepala sekolah g. Pengembangan kompetensi kepala sekolah h. Penugasan guru sebagai kepala sekolah swasta dan sekolah Indonesia di luar negeri i. Ketentuan lain yang mengatur penugasan guru sebagai kepala sekolah 	Tahun 2025 - 2026
3	Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	<p>a. Penataan kuantitas guru di seluruh wilayah Indonesia diperlukan untuk meningkatkan layanan dan mutu pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p> <p>b. Redistribusi guru Aparatur Sipil Negara pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diperlukan untuk pengaturan kuantitas guru.</p>	Tahun 2025 - 2026

3.4 Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi Kemendikdasmen sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, diperlukan dukungan kerangka kelembagaan yang mencakup struktur organisasi, tata kelola, dan manajemen aparatur sipil negara yang efektif dan efisien. Hal ini bertujuan agar Kemendikdasmen dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan optimal. Kerangka kelembagaan ini diharapkan dapat memastikan penataan organisasi yang selaras dengan

pencapaian sasaran strategis, serta meningkatkan efektivitas kelembagaan melalui struktur organisasi yang tepat, proses organisasi yang efisien, dan pencegahan terjadinya duplikasi tugas dan fungsi.

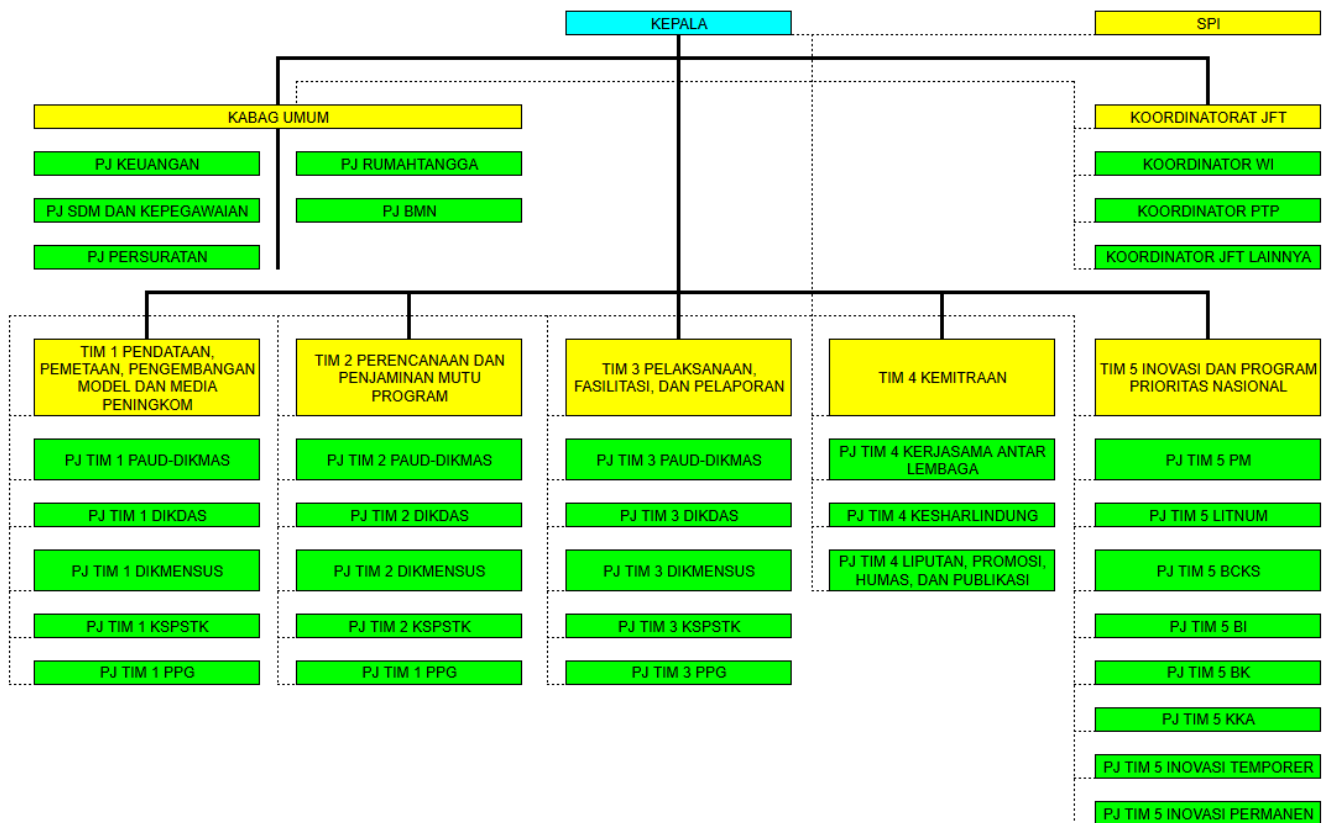
Mengacu kepada Permendikdasmen No.5 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, BBGTK Provinsi Jawa Barat memiliki tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan. Dalam melaksanakan tugas, BBGTK Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. pelaksanaan pemetaan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
2. pengembangan model peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
3. pengembangan media pembelajaran guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
4. pelaksanaan peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
5. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
6. pelaksanaan supervisi peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
7. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
8. pelaksanaan kemitraan di bidang pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan; dan
9. pelaksanaan urusan administrasi.

Susunan organisasi BBGTK Provinsi Jawa Barat terdiri atas:

- a. Kepala Bagian Umum;
- b. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan, evaluasi dan penyusunan laporan. Sementara itu, untuk mempercepat proses koordinasi serta pengelolaan kegiatan dibentuk Tim Kerja sebagaimana tergambar dalam struktur organisasi BBGTK Jawa Barat sebagai berikut:

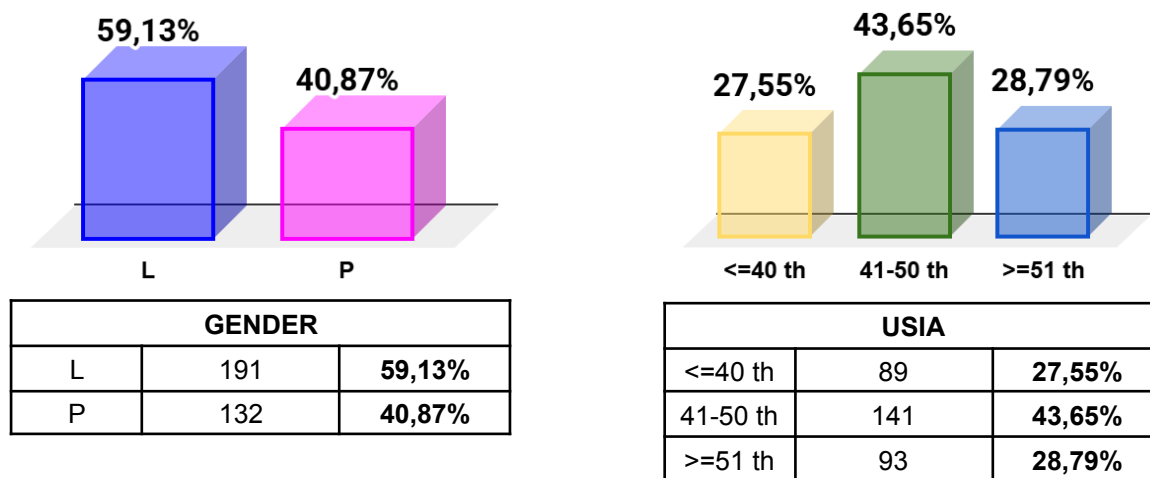


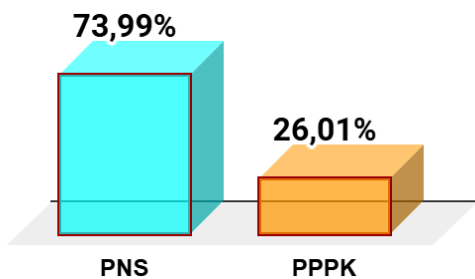
Gambar 3.1 Struktur Organisasi BBGTK Provinsi Jawa Barat

Kebijakan pengelolaan aparatur sipil negara dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki integritas, profesional, dan kompeten berdasarkan sistem merit sesuai bidang tugasnya sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan BBGTK Provinsi Jawa Barat.

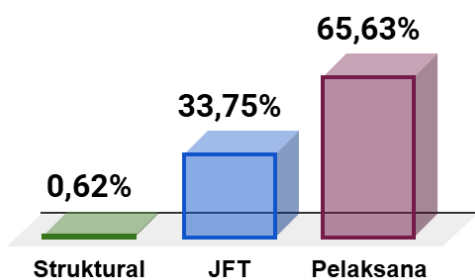
BBGTK Jawa Barat memiliki pegawai berjumlah 326 orang yang terdiri dari PNS dan PPPK

Tabel 3.4 Data Pegawai BBGTK Provinsi Jawa Barat

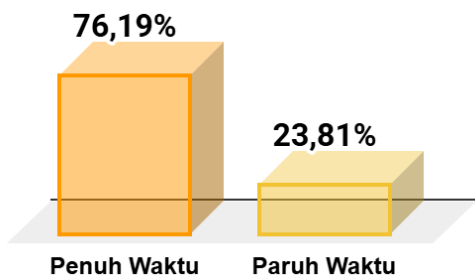




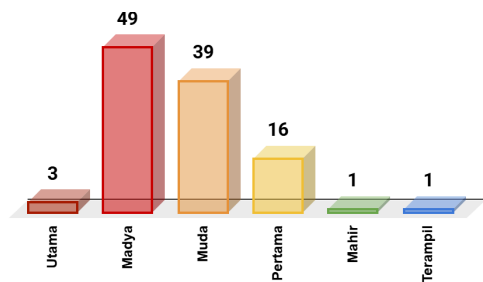
KELOMPOK ASN		
PNS	239	73,99%
PPPK	84	26,01%



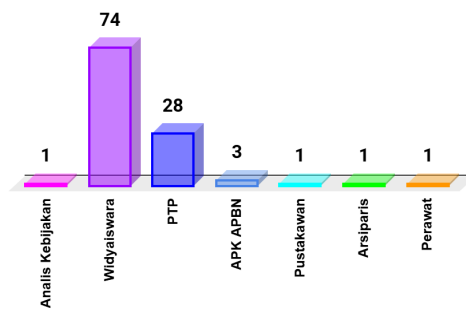
KELOMPOK JABATAN		
Struktural	2	0,62%
JFT	109	33,75%
Pelaksana	212	65,63%



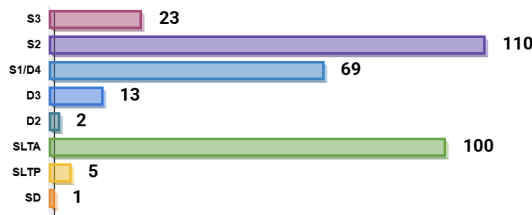
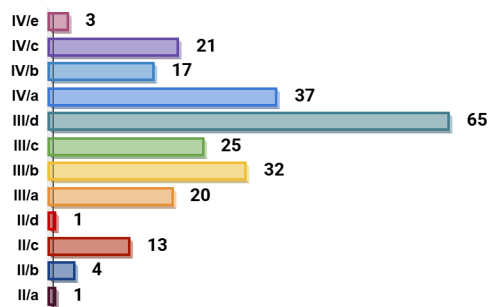
KATEGORI PPPK		
Penuh Waktu	64	76,19%
Paruh Waktu	20	23,81%



JENJANG JFT		
Utama	3	2,75%
Madya	49	44,95%
Muda	39	35,78%
Pertama	16	14,68%
Mahir	1	0,92%
Terampil	1	0,92%



KELOMPOK JFT		
Analisis Kebijakan	1	0,92%
Widyaiswara	74	67,89%
PTP	28	25,69%
APK APBN	3	2,75%
Pustakawan	1	0,92%
Arsiparis	1	0,92%
Perawat	1	0,92%



3.5 Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi BBGTK Provinsi Jawa Barat merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan Kemendikdasmen.

Sebagai bagian integral dari penguatan tata kelola kelembagaan, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025-2029 di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah diarahkan untuk memperkuat efektivitas organisasi dalam mendukung pencapaian visi pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter. Reformasi Birokrasi dilakukan untuk memastikan seluruh perangkat organisasi Kementerian mampu memberikan pelayanan publik yang responsif, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Program Reformasi Birokrasi Kemendikdasmen Tahun 2025-2029 bertujuan untuk mendorong terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari aspek jumlah, kompetensi (*hard competencies* dan *soft competencies*), maupun integritas. Penguatan manajemen dan kinerja menjadi landasan utama dalam membangun birokrasi yang profesional dan adaptif.

Selaras dengan kebijakan nasional terkait reformasi birokrasi serta mendukung visi pembangunan nasional dalam Asta Cita Presiden, khususnya Cita ke-7 tentang penguatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan digital yang melayani dan bebas dari korupsi, strategi kelembagaan Kementerian pada periode 2025-2029 menekankan dua dimensi utama Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. Reformasi Birokrasi General, difokuskan untuk memperkuat internal birokrasi yang efisien, profesional, dan adaptif melalui: penyederhanaan struktur organisasi agar lebih ramping, efisien, dan adaptif terhadap dinamika kebijakan pendidikan; Penguatan tata kelola internal yang berbasis sistem informasi terintegrasi dan pengambilan keputusan berbasis data; Manajemen SDM berbasis sistem merit, guna memastikan penempatan dan pengembangan pegawai sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi; Transformasi budaya kerja birokrasi, untuk mewujudkan organisasi yang kolaboratif, inovatif, dan berorientasi pada hasil.
2. Reformasi Birokrasi Tematik, difokuskan untuk mendukung penyelesaian isu-isu strategis pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui optimalisasi peran birokrasi.

Penguatan reformasi birokrasi menjadi pondasi penting dalam membangun organisasi kementerian yang adaptif, profesional, dan responsif terhadap tantangan pendidikan nasional. Transformasi kelembagaan yang terintegrasi dengan agenda reformasi birokrasi akan mempercepat terwujudnya birokrasi yang berdampak (*impactful bureaucracy*), tidak hanya pada level kebijakan, tetapi hingga pada tataran implementasi di sektor pendidikan.

Dengan demikian, arah reformasi birokrasi Kementerian ke depan tidak semata ditujukan pada efisiensi tata kelola, namun juga pada peningkatan kemampuan organisasi untuk menghadirkan layanan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, merata, dan inklusif, dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BBGTK Provinsi Jawa Barat serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, BBGTK Provinsi Jawa Barat menetapkan Sasaran Strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari kondisi yang dimaksud, setiap Sasaran Strategis diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Tabel 4.1 Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja BBGTK Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

Kode	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK	Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan						
IKK	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran	persen	1,31	1,44	1,58	1,74	1,91
7614.DCI	Pelatihan Bidang Pendidikan						
7614.DCI.003	Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Inovasi Pembelajaran dalam peningkatan kompetensi	Orang	560	616	677	742	814
7614.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat						
7614.QDC.011	Guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran	Orang	2.786	3.064	3.369	3.701	4.070
7614.SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan						
7614.SCI.010	Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru	Orang	674	737	812	890	976
7614.SCI.011	Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Inovasi Pembelajaran dalam peningkatan kompetensi	Orang	1.112	1.222	1.341	1.471	1.617
SK	Meningkatnya tata kelola Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat						
IKK	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal A	Predikat	A	A	A	A	A
IKK	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal sangat baik	Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
7619.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
7619.EBA.956	Layanan BMN	Layanan	1	1	1	1	1
7619.EBA.962	Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1
7619.EBA.994	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1

4.2 Kerangka Pendanaan

Upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan memerlukan dukungan beragam sumber daya, prasarana yang memadai, regulasi yang mendukung, serta pendanaan yang mencukupi. Sehubungan dengan itu BBGTK Provinsi Jawa Barat menentukan dukungan pendanaan, dan indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis sampai dengan tahun 2029 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2 Indikasi Kebutuhan Pendanaan BBGTK Provinsi Jawa Barat
Tahun 2025 - 2029 (dalam juta rupiah)

Program	Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)				
	2025	2026	2027	2028	2029
BBGTK PROVINSI JAWA BARAT					
Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran					
Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti pengembangan kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran	7.462	16.903	19.423	22.320	25.652
Guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran	19.541	263.292	328.977	410.682	513.204
Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah	47.800	43.414	65.463	78.267	64.066
Guru yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Literasi, Numerasi, dan Sains Teknologi	11.309	18.971	21.763	24.955	28.678
Program Dukungan Manajemen					
Layanan BMN	20,00	7,90	8,11	8,32	8,54
Layanan Umum	97,70	107,70	110,55	113,48	116,49
Layanan Perkantoran	47.461	47.461	48.718	50.009	51.335

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) Provinsi Jawa Barat disusun dalam rangka memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter sebagaimana yang dimandatkan kepada BBGTK Provinsi Jawa Barat. Rencana Strategis ini disusun untuk membawa perubahan dalam rangka; 1) penekanan fokus pada peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran bagi Guru dan Tenaga Kependidikan; 2) Capaian predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal A; dan 3) Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal sangat baik.

Rencana Strategis ini telah menjabarkan visi dan misi BBGTK Provinsi Jawa Barat beserta Sasaran Nasional dalam rangka mencapai sasaran program Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, sasaran strategis Kemendikdasmen, serta mencapai target Asta Cita Presiden pada bidang pendidikan. Rencana Strategis BBGTK Provinsi Jawa Barat telah menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan serta dilengkapi dengan indikator keberhasilannya guna untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Rencana Strategis ini menekankan komitmen BBGTK Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan seluruh rencana dan program yang telah ditetapkan dalam mencapai visi pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun sumber daya manusia unggul dan berdaya saing global. Rencana Strategis ini memberikan arah strategis bagi penguatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

Rencana Strategis BBGTK Provinsi Jawa Barat ini tidak hanya menjadi dokumen perencanaan strategis tetapi juga menjadi panduan yang dinamis dan responsif terhadap perubahan, mempertegas peran pendidikan sebagai instrumen utama untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat kohesi sosial bangsa.

BBGTK Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi berkala, penyesuaian kebijakan, serta memantau capaian indikator kinerja untuk menjamin pencapaian tujuan penguatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah provinsi jawa barat.

Kepala BBGTK Provinsi Jawa Barat



Dr. Sugito Adiwarsito, M.Pd.Or.
NIP.197208112002121001

LAMPIRAN

Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan BBGTK Provinsi Jawa Barat

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH														
SS 2	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan													
IKSS 2.2	Persentase peserta didik satuan pendidikan formal dan nonformal yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional:													
	a. Literasi Membaca		persen	68.62	70.62	72.62	74.62	76.62						
	b. Numerasi		persen	67.35	69.35	71.35	73.35	75.35						
DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran								25,932,283	39,960,077	41,969,943	43,769,614	45,554,936	
SP 2	Meningkatnya kualitas pembelajaran, kompetensi, dan karakter pada pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan													
IKP 2.2.7	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal		persen	71.5	85.06	85.96	86.87	87.77						
Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru														
7614	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan								822,260	2,698,576	3,402,999	4,154,570	4,830,385	
SK	Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan													

IKK	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran		persen	1.49	3.13	4.93	6.92	9.1						
7614.DCI	Pelatihan Bidang Pendidikan													
7614.DCI.003	Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti pengembangan kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran		Orang	11,073	12,144	13,358	14,694	16,163						
7614.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat													
7614.QDC.011	Guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran		Orang	17,945	19,740	21,714	23,885	26,274						
7614.SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan													
7614.SCI.010	Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah		Orang	5,000	5,500	6,050	6,655	7,321						
7614.SCI.011	Guru yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Literasi, Numerasi, dan Sains Teknologi		Orang	10,574	11,631	12,794	14,073	15,480						
BBGTK PROVINSI JAWA BARAT														
SK	Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan													
IKK	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran		persen	1.31	1.44	1.58	1.74	1.91	86,112	342,580	435,626	536,224	631,600	
7614.DCI	Pelatihan Bidang Pendidikan													
7614.DCI.003	Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Inovasi Pembelajaran dalam peningkatan kompetensi		Orang	560	616	677	742	814	7,462	16,903	19,423	22,320	25,652	
7614.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat													
7614.QDC.011	Guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran		Orang	2,786	3,064	3,369	3,701	4,070	19,541	263,292	328,977	410,682	513,204	
7614.SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan													
7614.SCI.010	Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru		Orang	674	737	812	890	976	47,800	43,414	65,463	78,267	64,066	

7614.SCI.011	Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Inovasi Pembelajaran dalam peningkatan kompetensi		Orang	1,112	1,222	1,341	1,471	1,617	11,309	18,971	21,763	24,955	28,678	
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH														
SS 5	Meningkatnya tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel													
IKSS 5.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian		Indeks	89.35	90	90.1	90.2	90.3						
WA	Program Dukungan Manajemen								4,216,889	5,746,449	6,278,623	6,995,550	7,832,573	
SP 5	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian													
IKP 5.1.19	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru		Predikat	A	A	A	A	A						
Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru														
7619	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru		Pusat						862,942	1,287,344	1,609,180	2,011,475	2,514,344	
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan,													
IKK	Persentase satker di Ditjen GTK dan PG yang memiliki predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal A		persen	82.5	85	87.5	90	92.5						
BBGTK PROVINSI JAWA BARAT														
SK	Meningkatnya tata kelola Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat													
IKK	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal A		Predikat	A	A	A	A	A						

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH													
SS 5	Meningkatnya tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel												
IKSS 5.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian		Indeks	89.35	90	90.1	90.2	90.3					
WA	Program Dukungan Manajemen								4,216,889	5,746,449	6,278,623	6,995,550	7,832,573
SP 5	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian												
IKP 5.1.20	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru		Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik					
Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru													
7619	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru	Pusat							862,942	1,287,344	1,609,180	2,011,475	2,514,344
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan,												
IKK	Persentase satker di Ditjen GTK dan PG dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik		persen	77.5	82.5	87.5	92.5	97.5					
7619.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal												
7619.EBA.956	Layanan BMN		Layanan	39	40	40	40	40					
7619.EBA.962	Layanan Umum		Layanan	39	40	40	40	40					
7619.EBA.994	Layanan Perkantoran		Layanan	40	40	40	40	40					
BBGTK PROVINSI JAWA BARAT													
SK	Meningkatnya tata kelola Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat												

IKK	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal sangat baik		Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	47,578.28	47,576.18	48,836.95	50,131.13	51,459.60	
7619.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
7619.EBA.956	Layanan BMN		Layanan	1	1	1	1	1	20.00	7.90	8.11	8.32	8.54	
7619.EBA.962	Layanan Umum		Layanan	1	1	1	1	1	97.70	107.70	110.55	113.48	116.49	
7619.EBA.994	Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1	47,461	47,461	48,718	50,009	51,335	

Lampiran 2: Matriks Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
1	Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Integrasi dan harmonisasi regulasi berkaitan dengan pendidikan yang saat ini diatur oleh tiga regulasi utama, yaitu UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, dan UU Pendidikan Tinggi. Revisi UU Sisdiknas akan menyelaraskan peraturan-peraturan dalam bidang pendidikan sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara satu regulasi dengan regulasi lainnya	Tahun 2025 - 2026
2	Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah	<p>1. Mengubah persyaratan dan mekanisme penugasan guru sebagai kepala sekolah. Kebijakan yang saat ini berjalan mensyaratkan calon kepala sekolah untuk memiliki sertifikat guru penggerak. Syarat tersebut diganti menjadi sertifikat lulus pelatihan bakal calon kepala sekolah. Hal ini perlu mengubah ketentuan dalam Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.</p> <p>2. Beberapa muatan yang akan disampaikan dalam peraturan ini antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Syarat bakal calon kepala sekolah b. Penyiapan bakal calon kepala sekolah c. Mekanisme pelatihan bakal calon kepala sekolah d. Mekanisme pengangkatan dan penugasan calon kepala sekolah e. Mekanisme perpanjangan dan pemberhentian kepala sekolah f. Tugas dan beban kerja kepala sekolah g. Pengembangan kompetensi kepala sekolah h. Penugasan guru sebagai kepala sekolah swasta dan sekolah indonesia di luar negeri i. Ketentuan lain yang mengatur penugasan guru sebagai kepala sekolah 	Tahun 2025 - 2026
3	Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	<p>a. Penataan kuantitas guru di seluruh wilayah Indonesia diperlukan untuk meningkatkan layanan dan mutu pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p> <p>b. Redistribusi guru Aparatur Sipil Negara pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diperlukan untuk pengaturan kuantitas guru.</p>	Tahun 2025 - 2026